



KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA: TINJAUAN PERKEMBANGAN TERKINI

Penyusun:
Nawa Poerwana Thalo
Peneliti The Indonesian Institute

Kata Pengantar:
Dr. Gorawut Numnak
Koordinator Economic Freedom Network Asia



ECONOMIC FREEDOM NETWORK ASIA

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Friedrich Naumann
STIFTUNG

FÜR DIE FREIHEIT

Judul	:	KEBEBASAN EKONOMI DI INDONESIA: Tinjauan Perkembangan Terkini
Penyusun	:	Nawa Poerwana Thalo Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute
Pengantar	:	Dr. Gorawut NUMNAK Koordinator Economic Freedom Network Asia
Koordinator	:	Adinda Tenriangke Muchtar Direktur Program The Indonesian Institute
Konsultan Riset	:	Anies Baswedan Direktur Riset The Indonesian Institute
Persiapan Cetak Naskah	:	Antonius Wiwan Koban The Indonesian Institute
Desain Cover & Layout	:	Harhar Muharam Benang Komunikasi
Cetak	:	Benang Komunikasi
Waktu Penelitian	:	September-November 2007
Dipublikasikan	:	November 2007
Oleh	:	 THE INDONESIAN INSTITUTE <small>CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH</small> Jl. Wahid Hasyim No. 194 Jakarta 10250, Indonesia Tel. 021 3905558 Fax. 021 31907814 www.theindonesianinstitute.com
Didukung oleh	:	 ECONOMIC FREEDOM NETWORK ASIA www.fnfasia.org/efn  FÜR DIE FREIHEIT www.fnst.org www.fnfasia.org

(c) November 2007 The Indonesian Institute

"Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dibuat di Indonesia. Publikasi hasil kajian ini disusun oleh The Indonesian Institute di bawah proyek kerja sama Economic Freedom Network Asia – The Indonesian Institute – Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Pandangan-pandangan yang mengemuka dalam publikasi hasil kajian ini tidak mesti merupakan pandangan dari Economic Freedom Network Asia dan/atau Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit".

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan hasil riset yang mendalam oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, yang juga memasukkan hasil presentasi makalah riset tersebut dalam sebuah Diskusi Publik di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada 22 November 2007. Penelitian ini memberikan kajian komprehensif tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.

Mengetahui apa yang diukur dan cara mengukurnya merupakan sebuah upaya untuk membuat suatu isu yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Untuk menilai situasi terkini sebuah negara, laporan ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan rekomendasi dari laporan *Economic Freedom of the World* (EFW), yang mengukur kebebasan ekonomi masyarakat dari lima aspek. Meneruskan studi yang dipelopori oleh penerima Nobel bidang ekonomi Milton Friedman, indeks yang dipublikasikan dalam laporan EFW mengukur tingkat dukungan institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan domestik terhadap iklim kebebasan ekonomi: pilihan pribadi, pertukaran sukarela, kebebasan untuk menyempurnakan dan melindungi kepemilikan pribadi.

Studi ini, dalam beberapa hal, mewakili penelitian yang berpandangan jauh ke depan atas karakter dan pola kehidupan sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Studi ini memberikan kontribusi yang berharga, tidak hanya tentang pemahaman ekonomi di Indonesia, namun juga kajian komprehensif atas permasalahan politis di tengah-tengah masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan sosial.

Kami, Economic Freedom Network Asia, senang untuk mendukung studi ini. Lebih jauh lagi, penghargaan juga kami tujukan kepada Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNS) yang telah memberikan dukungan finansial yang memungkinkan program riset ini terjadi, meskipun FNS terlepas dari tanggung jawab atas berbagai ide yang tercakup dalam kajian ini.

Sebagai Koordinator Economic Freedom Network Asia, saya sangat senang karena studi ini telah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan sebagai suatu laporan yang berguna baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Lebih jauh lagi, saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi yang mendalam untuk laporan ini.

Dr. Gorawut NUMNAK

Koordinator Economic Freedom Network Asia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Latar Belakang Kajian.....	3
Metodologi.....	3
Kebebasan Ekonomi Indonesia	8
I. Peran Pemerintahan : Pengeluaran, Pajak, dan BUMN.....	8
II. Hukum dan Jaminan Hak Kepemilikan	14
III. Uang	15
IV. Perdagangan Internasional.....	17
V. Regulasi Kredit, Tenaga Kerja dan Bisnis	23
Kesimpulan.....	30
Referensi	31
Tentang Penulis	32
Tentang Lembaga.....	33

Daftar Tabel & Grafik

Tabel 1. Peringkat Indonesia dalam Iklim Kebebasan Ekonomi	2
Tabel 2. Perkembangan Harga Produk BBM.....	8
Grafik 1. Rasio Konsumsi Terhadap PDB	10
Grafik 2. Rasio Subsidi Terhadap PDB (%)	11
Grafik 3. Rasio Aset BUMN terhadap PDB.....	12
Grafik 4. Rasio Pajak Pendapatan Terhadap PDB	13
Grafik 5. Indikator Tatakelola	14
Grafik 6. Berbisnis di Indonesia: Beberapa Kemudahan	15
Grafik 7. Pertumbuhan Uang Beredar	16
Grafik 8. Tingkat Inflasi Tahunan	17
Grafik 9. Keterbukaan Perdagangan Internasional.....	18
Grafik 10. Pajak Ekspor Impor.....	18
Grafik 11. Waktu (hari) untuk Pengurusan Dokumen Ekspor Impor	19
Grafik 12. Kepemilikan Asing, Investasi Portofolio (Triliun Rp)	22
Grafik 13. Dana Pihak Ketiga	23
Grafik 14. Persentase Terhadap Aset Perbankan Nasional.....	24
Grafik 15. Pertumbuhan Aset	24
Grafik 16. Penyaluran Kredit (%).....	25
Grafik 17. Pertumbuhan Jumlah Pengangguran dan PDB Riil	26
Grafik 18. Pertumbuhan Upah Minimum	26
Grafik 19. Kekakuan Pasar Tenaga Kerja (Indeks).....	27
Grafik 20. Kemudahan Berbisnis.....	29

KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA: TINJAUAN PERKEMBANGAN TERKINI

"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them our necessities but of their advantages."

- Adam Smith, *The Wealth of Nations* -

PENDAHULUAN

I. Landasan Teoritis

Tercerai-berainya Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin ternyata masih belum cukup untuk menghentikan perdebatan seputar sistem yang tepat untuk mengatur jalannya perekonomian. Diskusi masih terus berlangsung, baik di tingkat akademisi hingga para pembuat kebijakan publik.

Namun para pemenang Nobel ekonomi seperti Milton Friedman dan Douglas North benar-benar mempercayai bahwa masyarakat yang bebas (*free society*)- yang kemudian melahirkan kondisi ekonomi yang bebas dan berbasis pasar- jauh lebih produktif secara ekonomi ketimbang metode-metode lain yang mengatur aktivitas ekonomi. Keikutsertaan negara dalam mempengaruhi pasar hanya akan menciptakan disinsentif bagi ekonomi.

Para pembela pasar bebas yakin, bahwa sistem pasar bebas akan melahirkan persaingan antar pelaku ekonomi. Persaingan akan mendorong lahirnya berbagai ide inovatif, yang akhirnya mengarahkan manusia dalam kehidupan yang lebih sejahtera. Ini dimungkinkan karena pasar bebas berorientasi pada insentif, upaya untuk peningkatan produktivitas, dan penggunaan sumber daya yang efektif, sehingga cenderung membawa manfaat bagi konsumen.

Bahkan, persaingan dengan sendirinya akan menghapus diskriminasi, karena diskriminasi hanya akan menimbulkan biaya tinggi bagi mereka yang melakukannya. Singkatnya, persaingan akan selalu menghukum perilaku yang diskriminatif.

Pemikiran kebebasan ekonomi didasarkan pada kepemilikan pribadi, pilihan pribadi, pertukaran sukarela, dan pasar yang bebas untuk dimasuki. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan penuh atas segala yang dimilikinya selama tidak berbenturan dengan kebebasan yang juga dimiliki oleh individu lainnya.

Dengan demikian, jika sebuah negara mendukung kebebasan ekonomi, pemerintahnya harus menjamin keamanan kepemilikan pribadi individu, serta menjaga kepastian hukum. Karena jika

negara gagal dalam melindungi kepemilikan pribadi, atau membangun hambatan yang membatasi terjadinya pertukaran sukarela, maka negara tersebut dianggap telah merusak kebebasan individu masyarakatnya.

Di sisi lain, para pembela pasar bebas menghadapi tentangan. Kritik yang kerap kali diajukan ialah bahwa sistem pasar bebas hanya akan melahirkan ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan kronis, dan lain-lain. Para pembela sistem pasar tidak sependapat dengan hal ini. Namun, tanpa adanya pengukuran kebebasan ekonomi -yang dinyatakan dalam satuan indeks- hanya akan melahirkan perdebatan kusir.

Mendapat tentangan, dan dilandasi rasa percayanya, Milton Friedman, Douglass North, dan Mike Walker memprakarsai dilaksanakannya proyek *Economic Freedom of The World* (EFW). Proyek ini bertujuan untuk menyusun indeksasi kebebasan ekonomi setiap negara di dunia, untuk membuktikan bahwa sistem pasar berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

II. Bukti Empiris

Kerja keras dari proyek tersebut mendatangkan hasil. Ketika indeks berhasil disusun, berbagai studi menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi misalnya oleh Barro (1994), De Vanssay and Spindler (1994), Johnson and Sheehy (1995), Scully (1992), and DeHaan and Siermann (1998).¹

Bahkan, kebebasan ekonomi juga mengurangi angka kemiskinan, menekan angka kematian anak-anak balita, mendukung demokrasi, dan memperpanjang usia (*life expectancy*) masyarakat.² Lebih jauh, Tures (2003) menyatakan bahwa kebebasan ekonomi mampu mengurangi potensi terjadinya konflik sosial.

III. Peringkat Indonesia

Peringkat Indonesia selalu berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan jumlah negara yang dinilai atau karena membaik atau memburuknya iklim kebebasan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Berikut adalah peringkat Indonesia dari jumlah negara yang diukur:

Tabel 1. Peringkat Indonesia dalam Iklim Kebebasan Ekonomi

1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
43 dari 54	47 dari 72	64 dari 105	28 dari 111	31 dari 113	45 dari 123	79 dari 123	99 dari 123	89 dari 123	77 dari 127	82 dari 130	86 dari 141

Sumber: Economic Freedom of the World Project. 2007. Diperoleh dari <http://www.freetheworld.com/> pada 23 Oktober 2007.

1 Madan, Anisha (2002), "The Relationship between Economic Freedom and Socio – Economic Development", diakses dari <http://www.econ.ilstu.edu/uaaje>.

2 Untuk kajian ringkas lebih jauh, dapat dilihat di Gwartney, James dan Lawson, "Ten Consequences of Economic Freedom" NCPA Policy Report No. 268.

LATAR BELAKANG KAJIAN

I. Identifikasi Masalah

Berdasarkan peringkat tersebut, menurut EFW, sejak tahun 1970 Indonesia selalu masuk dalam kategori ekonomi yang “tidak bebas”. Secara teoritis, hal tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan potensialnya. Padahal saat ini Indonesia sangat membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

II. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang kami ajukan ialah: Dalam kurun waktu dua tahun ini, apakah pemerintah Indonesia sudah berkontribusi dalam penciptaan iklim kebebasan ekonomi di tanah air?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka kajian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi atas situasi ekonomi terkini dan dampaknya bagi kebebasan ekonomi di Indonesia.

METODOLOGI

Dalam melakukan evaluasi atas kebebasan ekonomi Indonesia ini, kami menggunakan kerangka yang selalu digunakan oleh Gwartney dan Lawson (2007). Namun demikian, kami meyakini bahwa beberapa variabel perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Obyek penelitian kami ialah Republik Indonesia. Sedangkan data yang digunakan sebagian besar menggambarkan kondisi pada tahun 2004, 2005, bahkan 2006. Sebagian besar data kami peroleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Departemen Keuangan (Depkeu), Bank Dunia (the World Bank), dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Diharapkan dengan memberikan data dan menggambarkan latar belakangnya, kami dapat memperoleh gambaran atas kemajuan iklim kebebasan ekonomi di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap lima aspek, yang terdiri dari:

I. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Nasional

Tujuan penilaian dari aspek ini ialah untuk memperoleh gambaran tentang besar kecilnya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi nasional. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomis, tidak jarang pemerintah tersandera oleh kepentingan politisnya. Hal ini berbeda dengan keputusan individu, yang sangat didominasi oleh kepentingan ekonomis semata. Dengan demikian, semakin besarnya peran pemerintah dengan sendirinya akan memperkecil porsi bagi individu untuk berperan dalam perekonomian.

Untuk mendapat gambaran tersebut, kami menghitung rasio antara:

1. Rasio konsumsi dengan Produk Domestik Bruto (PDB)

Perhitungan ini menggambarkan dominasi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap perekonomian. Ketika konsumsi pemerintah bertambah, berarti pengeluaran individu, rumah tangga, dan sektor bisnis digantikan oleh keputusan-keputusan pemerintah, yang cenderung bersifat politis. Dengan demikian, hal tersebut menurunkan kebebasan ekonomi individu.

2. Rasio subsidi dengan PDB

Rasio ini menggambarkan peran subsidi dalam perekonomian nasional. Pemberian subsidi membatasi kebebasan orang untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya. Jika seseorang tidak berminat untuk memiliki produk bersubsidi, maka secara otomatis orang tersebut tidak menikmati subsidi. Dengan demikian, orang tersebut menghadapi pilihan yang terbatas.

Selain itu, subsidi diperoleh dari pajak yang dikumpulkan dari individu, untuk ditransfer kepada individu yang lain. Semakin besar subsidi mencerminkan semakin besarnya ketergantungan (ketidakbebasan) sekompok individu terhadap kelompok individu yang lainnya.

3. Rasio aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PDB

Rasio ini menggambarkan peran pemerintah terhadap PDB melalui perusahaan-perusahaan negara. Dengan kata lain, rasio ini menggambarkan besarnya ketergantungan perekonomian nasional terhadap perusahaan negara. Semakin besarnya dominasi perusahaan negara terhadap ekonomi nasional akan mengecilkan peranan sektor privat. Dengan sendirinya hal tersebut akan mengurangi kebebasan individu.

4. Rasio pajak penghasilan terhadap PDB

Rasio ini menggambarkan ketergantungan individu terhadap pemerintah. Tingkat pajak penghasilan yang tinggi akan mengurangi kebebasan individu para pekerja untuk menikmati buah dari jerih payahnya.

II. Aspek Hukum, Tatakelola (*Governance*) dan Kemudahan Memperoleh Jaminan Kepemilikan

Adanya jaminan bahwa pemerintah melindungi hak kepemilikan individu merupakan elemen kunci dari kebebasan ekonomi. Lebih jauh, kesuksesan negara dalam penjaminan tersebut tergantung pada kondisi penegakan hukum di negara yang bersangkutan. Di sisi lain, hukum seringkali diintervensi oleh kekuatan politis.

Dengan demikian, aspek yang menyangkut masalah penegakan hukum, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya perlu dievaluasi. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar negara menjamin kepemilikan individu –yakni kebebasan ekonomi- dan kepastian hukumnya.

Untuk memperoleh gambarannya, kami menggunakan indikator-indikator berikut:³

1. Suara rakyat dan akuntabilitas, yang mengukur seberapa besar rakyat mampu berpartisipasi dalam memilih pemimpinnya. Indikator ini juga mengukur kebebasan masyarakat dalam berekspresi, berasosiasi, dan kebebasan media.
2. Stabilitas politik dan kekerasan, yang mengukur kemungkinan menurunnya stabilitas, bahkan digulingkannya pemerintahan dengan cara yang tidak konstitusional dalam bentuk kekerasan dan terorisme.
3. Efektivitas pemerintahan, yang mengukur kualitas pelayanan publik dan sipil, tingkat independensi pemerintah dari tekanan politis, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan kebijakannya.
4. Kualitas pengaturan, yang mengukur kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendorong pengembangan sektor swasta.
5. Penegakan hukum, yang mengukur tingkat kepercayaan para agen ekonomi dalam penegakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, kualitas kepatuhan terhadap kontrak, polisi, pengadilan, serta tingkat kriminalitas dan kekerasan.
6. Pengendalian korupsi, yang mengukur tingkat keseriusan pemerintah dalam mengurangi tingkat korupsi, baik besar maupun kecil.
7. Pendaftaran kepemilikan, untuk mengukur kemudahan dalam mendaftarkan kepemilikan atas suatu aset. Pengukuran didasarkan pada lamanya waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
8. Penegakan hukum atas pelanggaran kontrak bisnis, yang mengukur banyak prosedur, jumlah biaya, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dalam penegakan kontrak bisnis.
9. Kemudahan menutup usaha, untuk mengukur lamanya waktu dan besarnya biaya yang diperlukan untuk menutup usaha, serta tingkat pengembalian (*recovery rate*) yang diperoleh.

III. Akses Terhadap Uang yang Stabil

Pertukaran (*trade*) memberikan perolehan (*gains*) bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Namun, tingkat inflasi yang tinggi dengan sendirinya akan mengurangi nilai riil dari pertukaran tersebut. Terlebih apabila tingkat inflasi yang terjadi cenderung memiliki volatilitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan sulitnya dunia usaha untuk memprediksi angka inflasi yang akan terjadi.

³ Kaufmann, Daniel, Kraay, Mastruzzi (2007), "Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006", The World Bank.

Perolehan yang menurun dan sulitnya memprediksi angka inflasi akan menurunkan kebebasan dalam melakukan pertukaran akibat disinsentif yang diciptakannya. Dengan demikian, tujuan pengukuran aspek ini ialah untuk mengetahui tingkat stabilitas nilai uang dalam suatu perekonomian dan bagaimana tingkat volatilitas inflasi di negara tersebut. Adapun indikator yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan PDB riil dan inflasi

Indikator ini memperlihatkan perbandingan antara jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Idealnya, rata-rata tingkat pertumbuhan uang kartal (M1) adalah sama dengan penjumlahan rata-rata pertumbuhan PDB riil dan rata-rata inflasi dalam jangka panjang.

2. Tingkat inflasi selama beberapa tahun terakhir

Indikator ini memperlihatkan tingkat inflasi selama tiga tahun terakhir. Kebebasan ekonomi akan meningkat apabila tingkat inflasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

3. Volatilitas tingkat inflasi selama lima tahun terakhir

Indikator ini menggambarkan tingkat kesulitan dalam memprediksi angka inflasi. Semakin besar angkanya, maka semakin sulit bagi dunia usaha memperkirakan angka inflasi. Dengan demikian, hal tersebut akan mengekang kebebasannya untuk mengambil keputusan bisnis.

IV. Perdagangan Internasional

Secara praktis, kini hampir setiap negara di dunia telah menjelma menjadi “open economy”. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat keterbukaannya (*degree of openness*). Dengan tujuan tertentu—seperti meningkatkan perolehan pajak, melakukan proteksi atas pasar domestik—banyak negara yang menciptakan hambatan bagi arus barang, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif.

Pembebanan pajak ekspor-impor merupakan salah satu bentuk hambatan dalam wujud tarif. Sedangkan salah satu bentuk hambatan non-tarif ialah kemudahan dalam pengurusan dokumen yang diukur dalam jumlah banyaknya dokumen yang diperlukan, waktu, serta biaya yang diperlukan dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional tersebut.

Lebih jauh, hambatan perdagangan lintas batas tidak hanya mengekang kebebasan ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah lain yang berakibat lebih fatal, seperti penyelundupan. Dalam hal ini, para importir yang jujur dan membayar bea masuk akan kehilangan daya saing karena harga jual produk yang lebih mahal.

Selanjutnya, aspek ini tidak hanya mengukur hambatan dalam melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga hambatan dalam aktivitas investasi asing. Untuk investasi asing, kami membaginya menjadi dua jenis, yakni investasi langsung (*foreign direct investment*), dan investasi portofolio.

Sedangkan pasar gelap valuta asing merupakan indikator dari fleksibilitas nilai tukar. Jika sebuah negara menganut rejim nilai tukar mengambang bebas, maka kecil kemungkinan pasar gelap valuta asing yang bermunculan. Namun, jika negara tersebut menganut sistem nilai tukar tetap, kemungkinan pasar gelap valuta asing bermunculan, karena adanya perbedaan antara nilai tukar nominal dengan nilai tukar riil.

Singkatnya, indikator-indikator yang kami gunakan untuk mengevaluasi aspek ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak ekspor-impor
2. Kemudahan dalam pengurusan dokumen
3. Pengendalian arus modal asing
4. Pasar gelap valuta asing

V. Regulasi Pasar Kredit, Tenaga Kerja dan Bisnis

Aspek ini dievaluasi untuk mengetahui seberapa jauh peran pemerintah dalam mengatur aktivitas di pasar kredit, tenaga kerja, dan bisnis. Indikator yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan aset, penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank-bank BUMN

Indikator ini menggambarkan peran BUMN dalam menggerakkan perekonomian. Kami mengukur kontribusi DPK bank-bank BUMN terhadap total DPK yang dapat dihimpun oleh sektor perbankan. Karena, semakin besar dana yang dihimpun, maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan untuk menggerakkan perekonomian. Semakin besarnya peran bank-bank BUMN akan mereduksi peran bank swasta dalam mendukung aktivitas perekonomian.

2. Upah minimum nasional

Indikator ini menggambarkan angka pertumbuhan upah minimum nasional yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan itu sendiri sebenarnya sudah mereduksi kebebasan ekonomi, baik yang dimiliki oleh para pencari kerja maupun para penyedia lapangan pekerjaan.

3. Fleksibilitas pasar tenaga kerja

Indikator ini menampilkan kondisi fleksibilitas tenaga kerja. Seperti halnya kebijakan upah minimum, indikator ini menggambarkan tingkat kebebasan ekonomi, baik para pencari kerja maupun penyedia lapangan kerja. Semakin tidak fleksibel pasar tenaga kerja, maka semakin rendah kebebasan ekonomi. Untuk memperoleh gambarannya, indikator yang kami lihat ialah sebagai berikut:

- a. Kesulitan meng-hire pekerja
- b. Kekakuan jam kerja
- c. Kesulitan memberhentikan pekerja
- d. Biaya memberhentikan pekerja

4. Regulasi dunia usaha

Indikator ini menggambarkan tingkat kemudahan untuk melakukan bisnis dan berbagai aktivitas penunjangnya. Semakin banyak regulasi, maka semakin sulit dan semakin mahal pula untuk memulai dan memberhentikan bisnis. Banyaknya regulasi tentu saja menciptakan hambatan untuk masuk kedalam pasar. Dengan sendirinya hal tersebut mereduksi kebebasan ekonomi masyarakat pebisnis.

Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat kesulitan regulasi bisnis, kami menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Memulai usaha
- b. Lamanya mengurus ijin
- c. Fleksibilitas tenaga kerja
- d. Pendaftaran properti
- e. Memperoleh kredit
- f. Perlindungan investor
- g. Pembayaran pajak
- h. Perdagangan lintas perbatasan
- i. Kepatuhan kontrak
- j. Menutup usaha

KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA

I. Peran Pemerintahan: Pengeluaran, Pajak, dan BUMN

Bergejolaknya harga minyak di pasar dunia memaksa pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, harga BBM meningkat. Tidak lama berselang, harga minyak di pasar dunia kembali bergejolak, bahkan dengan intensitas yang lebih hebat.

Akibatnya, pemerintah kembali mengurangi subsidi. Harga BBM kembali meningkat di awal kuartal terakhir tahun 2005, hingga rata-rata lebih dari 100 persen (lihat tabel berikut).

Tabel 2. Perkembangan Harga Produk BBM

Tanggal	Pertamax Plus	Pertamax	Premium	M. Tanah	M. Solar	M. Diesel	M. Bakar	Keterangan
1 Oktober 2004	2.75	2.45	1.81	1.8	1.65	1.65	1.56	Harga Eceran
			2.1	2.2	2.1	2.05	1.6	Harga Industri
1 Maret 2005	4.2	4	2.4	2.2	2.1	2.3	2.3	Harga Eceran
			2.87	2.79	2.7	2.66	2.3	Harga Industri
1 Oktober 2005	5.9	5.7	4.5	2	4.3	-	-	
			5.16	5.6	5.35	5.13	3.15	Harga Jual Pasar

Sumber: Pertamina

Sebagai kompensasinya, pemerintah menjanjikan bantuan tunai langsung (BTL) kepada keluarga miskin. Sedangkan bagi dunia bisnis, pemerintah menjanjikan untuk memberi keringanan pajak bagi beberapa sektor usaha.

Melemahnya kinerja dunia usaha akibat pukulan harga BBM membuat pemerintah merasa perlu mengambil peran sebagai "mesin pertumbuhan" (*engine of growth*). Caranya ialah dengan mendorong stimulus fiskal terutama melalui pelaksanaan berbagai proyek. Diharapkan hal ini dapat mengimbangi lesunya kinerja sektor bisnis sambil menciptakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas ekonomi.

Namun sayangnya, pemerintah mengalami hambatan dalam menjalankan perannya tersebut. Pelaksanaan proyek berjalan tersendat akibat ketidakdisiplinan dalam pencairan anggaran.⁴ Selama semester I 2005, anggaran belanja negara yang dicairkan hanya 6-7 persen dari total anggaran belanja setahun.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan sistem penganggaran -dengan diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara- dan berlarut-larutnya pembahasan APBN di DPR. Sehingga pencairan anggaran tahun 2005 mengalami keterlambatan.

Konsekuensinya, meskipun sudah dipercepat, hingga akhir tahun 2005 anggaran belanja pemerintah yang bisa terserap hanya 90 persen. Sisanya, yakni sebesar Rp 12,95 triliun, dialihkan penggunaannya (*carry over*) ke tahun 2006.⁵

Kegagalan pencairan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Belum siapnya departemen atau lembaga penerima alokasi, karena penunjukan pejabat teknis baru dilakukan.
- b. Proyek-proyek penyediaan barang publik seperti infrastruktur terkendala masalah pembebasan lahan.
- c. Maraknya pemberantasan korupsi membuat banyak pejabat yang tidak bersedia menjadi pimpinan proyek. Khawatir jika terjadi kesalahan mereka dituding sebagai koruptor.
- d. Sulitnya menyeragamkan program kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah-pemerintah daerah. Padahal seharusnya program pembangunan di daerah harus bisa mendukung pencapaian program-program nasional. Dengan kata lain, tidak adanya keterkaitan antara sasaran nasional dan sasaran daerah.

4 Kelambatan pencairan anggaran sudah terjadi selama beberapa tahun berturut-turut. Tahun 2005 hanya sebagai contoh kasus.

5 Untuk menjamin agar program yang telah direncanakan pemerintah tetap bisa berjalan, Pemerintah dan DPR sepakat melimpahkan pelaksanaannya hingga April 2006. Namun sampai awal April, Departemen Keuangan. melaporkan bahwa penggunaan anggaran yang seharusnya habis pada 2005 itu baru mencapai Rp 3 triliun. Bahkan terdengar kabar bahwa kebanyakan alokasi anggaran itu kini ditanamkan dulu di Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dampak dari lambatnya pencairan anggaran akan melahirkan pelaksanaan proyek yang tergesa-gesa (*crash program*), yang dapat menambah kesulitan masyarakat dan cenderung tidak memperhatikan kualitas hasil pekerjaannya.

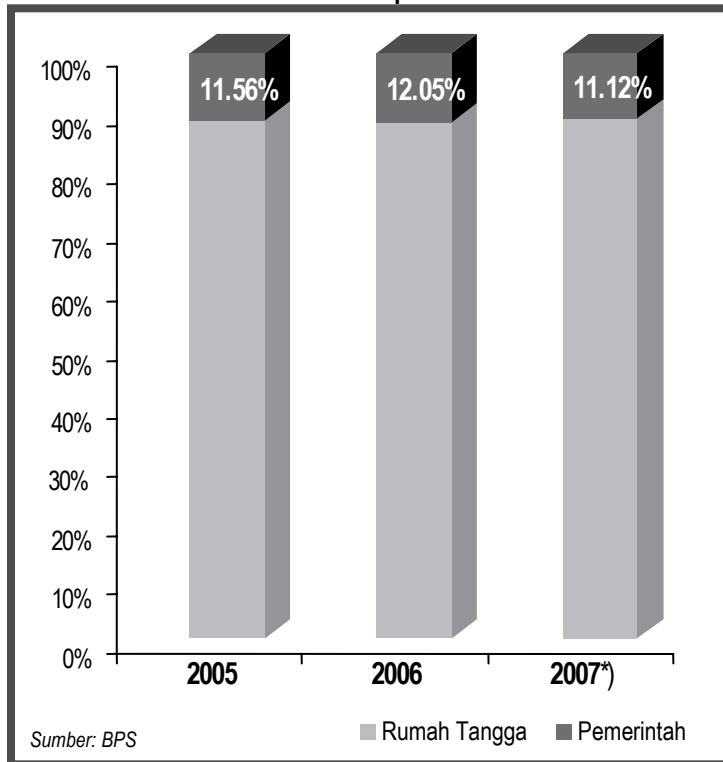
Dari sinilah dapat dilihat bagaimana pemerintah kurang dapat menjalankan perannya sebagai pemerata pendapatan. Pajak yang dipungut dari rakyat seharusnya dikembalikan ke dalam sistem perekonomian melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Namun, yang terjadi ialah justru pengangguran dana yang tidak membawa faedah kepada siapapun. Dengan demikian, penurunan pajak sangat layak untuk dipertimbangkan

1. Konsumsi

Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, pada tahun 2005 hingga proyeksi tahun 2007F, rasio konsumsi pemerintah terhadap total konsumsi nasional mengalami perubahan yang sangat kecil. Namun, konsumsi pemerintah pada tahun 2006 sebenarnya melaju lebih cepat, yakni sebesar delapan persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga hanya bertumbuh sebesar tiga persen.

Grafik 1. Rasio Konsumsi Terhadap PDB



Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya tekanan untuk membuat pemerintah bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Munculnya dorongan tersebut disebabkan selama tahun 2005 pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, yang menciptakan ekspektasi melemahnya daya beli masyarakat. Untuk mengimbangnya, pemerintah merasa perlu meningkatkan konsumsinya.

Namun memasuki tahun berikutnya, yakni tahun 2007, tingkat konsumsi pemerintah kembali turun, bahkan di bawah angka tahun 2006. Menurunnya porsi konsumsi pemerintah akan berakibat meningkatnya pilihan individu dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

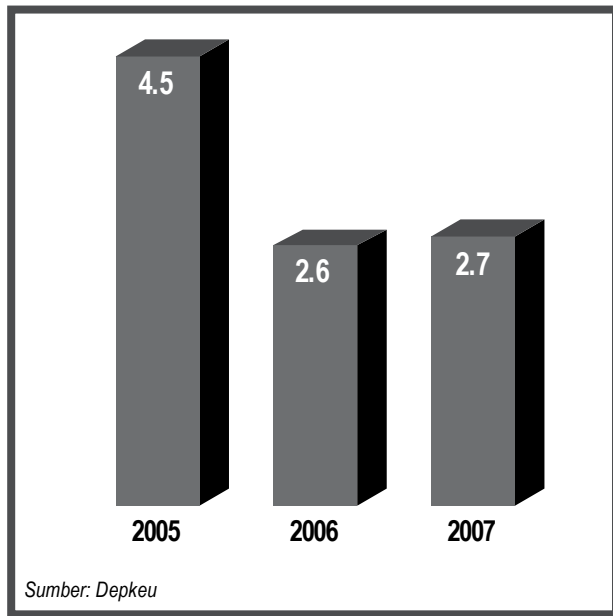
2. Subsidi

Grafik berikut menggambarkan rasio subsidi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2006, rasio tersebut menyusut hanya menjadi 2,6 persen, dari yang semula sebesar 4,5 persen, namun naik lagi pada tahun berikutnya.

Grafik 2. Rasio Subsidi Terhadap PDB (%)

Lonjakan angka subsidi yang terjadi pada tahun 2005 ketika itu disebabkan oleh melonjaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebesar 3,4 persen dari PDB merupakan subsidi BBM. Sedangkan subsidi non-BBM hanya memperoleh sisanya, yakni sebesar 1,1 persen.

Adapun lonjakan subsidi BBM disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia, yang menciptakan persepsi adanya ancaman bagi anggaran (*fiscal at risk*) Pemerintah RI sebagai importir minyak. Hal ini menimbulkan kepanikan bagi para investor.



Memasuki tahun 2005, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS semakin merosot. Akhirnya, pemerintah menaikkan harga BBM pada akhir 2005. Konsekuensinya, tekanan fiskal berkurang karena subsidi yang mengecil, sebagaimana terlihat pada grafik di atas.

Namun, sejak Oktober 2007 lalu, harga minyak di pasar dunia kembali meningkat dengan akselerasi yang sangat cepat. Banyak pihak meramalkan harga minyak akan menembus angka 100 dolar per barel (dpb). Jika hal tersebut terjadi dan berlangsung lebih dari tiga bulan, maka harga minyak secara rata-rata menjadi naik.

Konsekuensinya, disparitas harga BBM domestik dengan internasional akan semakin besar. Untuk mengurangi tekanan fiskal, secara logis pemerintah harus menaikkan kembali harga BBM dalam negeri.

Namun, kami memperkirakan bahwa hal tersebut kemungkinan kecil terjadi mengingat kondisi ekonomi yang belum siap untuk menerima kenaikan harga BBM lagi. Bahkan, Presiden RI telah menjanjikan bahwa kenaikan BBM tidak akan terjadi lagi.

Dengan demikian, jika harga minyak rata-rata menjadi 80 dpb, hal ini akan menyebabkan timbulnya selisih sebesar 20 dpb dari yang diasumsikan pada APBN Perubahan tahun 2007. Akibatnya, subsidi BBM akan mengalami peningkatan sebesar Rp 15 triliun.

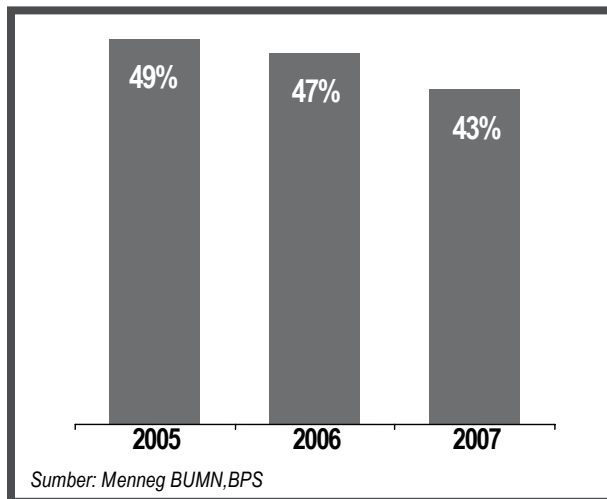
Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi pada tahun 2006. Pada tahun tersebut, harga minyak dunia tidak mengalami peningkatan yang terlalu tajam. Di sisi lain, akibat kenaikan harga BBM sebesar 100 persen lebih pada triwulan akhir tahun 2005, konsumsi BBM domestik sempat menyusut hingga 40 persen. Hal ini jelas berdampak positif bagi keberlanjutan fiskal.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa rasio subsidi terhadap PDB pada tahun 2007 ini kemungkinan besar tidak akan lebih kecil dari rasio pada tahun 2006 lalu. Hal ini berimplikasi negatif bagi angka kebebasan ekonomi.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Grafik 3 memperlihatkan adanya penurunan rasio aset BUMN terhadap total PDB. Secara teoritis, penurunan aset dapat diartikan sebagai adanya penurunan kemampuan menghasilkan produk.

Grafik 3. Rasio Aset BUMN terhadap PDB



Sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi, hal tersebut memberikan dampak yang positif. Ini terjadi karena penurunan aset BUMN akan memberikan ruang gerak yang lebih bagi sektor swasta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Namun, kami meyakini bahwa dampak positif tersebut tidak bersifat berkelanjutan. Dalam arti, penurunan aset bisa jadi memang disebabkan oleh faktor makro-mikro ekonomi, karena secara ideologis Pemerintah RI tetap menginginkan agar BUMN memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Ini terlihat dari keinginan pemerintah dalam mengembangkan BUMN, yakni dengan melakukan Revitalisasi BUMN.⁶ Strategi yang dilakukan pemerintah ialah dengan menciutkan jumlah BUMN. Jika pada tahun 2007 ini BUMN masih berjumlah 102 perusahaan, pada tahun 2009 diharapkan hanya tinggal 69 perusahaan.

Karena penciutan jumlah dilakukan melalui konsolidasi bisnis-yakni dengan melakukan merger dan akuisisi- maka, *ceteris paribus*, sangat logis jika kami meyakini bahwa nilai aset BUMN akan membesar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini menciptakan disinsentif bagi posisi sektor swasta di dalam pasar.

⁶ Tujuan mulia revitalisasi ini ialah untuk menghapus stigma yang selama ini melekat pada BUMN. Selama ini BUMN dianggap sebagai organisasi bisnis yang tidak efisien, bahkan kerap dianggap sebagai “sapi perah” para politisi.

Dengan demikian, apa yang terlihat pada grafik berpotensi menciptakan pengambilan kesimpulan yang menyesatkan. Dengan kata lain, penurunan aset BUMN tidak akan menjadi sebuah kecenderungan (*trend*). Jumlah BUMN memang akan semakin sedikit, namun secara aset akan menjadi lebih besar. Jika demikian yang terjadi, hal ini berdampak negatif bagi kebebasan ekonomi.

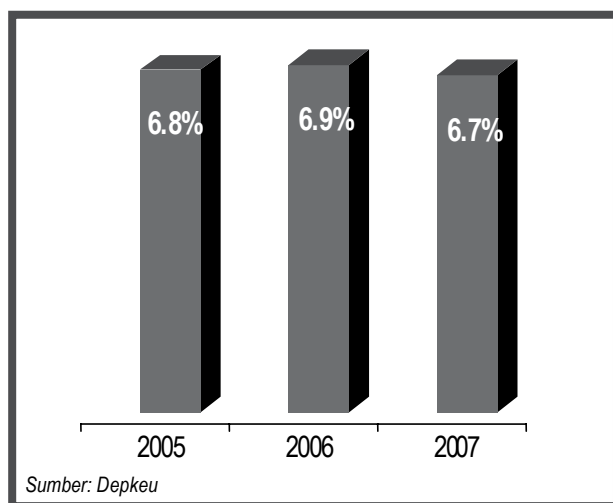
Namun, hal yang perlu dipertimbangkan ialah semangat pemerintah dalam melakukan privatisasi BUMN. Beberapa usaha BUMN yang dianggap *profitable* layak ditawarkan kepada sektor swasta, atau bahkan masyarakat umum melalui pasar modal.

Selain itu, hal positif lainnya ialah bahwa hampir semua BUMN di Indonesia menghadapi persaingan di dalam pasarnya. Atau dengan kata lain, mereka tidak beroperasi di dalam pasar yang diproteksi. Ini merupakan perkembangan positif, meskipun pemerintah tetap menjadi pemegang saham mayoritas.

4. Pajak Penghasilan

Grafik 4 memperlihatkan hampir tidak adanya perbedaan yang mencolok pada rasio pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2007 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh seiringnya pertumbuhan output nasional dengan penghasilan masyarakat. Namun, akselerasi pertumbuhan nilai pajak mengalami peningkatan, dari 17 persen pada tahun 2006 menjadi 19 persen pada tahun 2007.

Grafik 4. Rasio Pajak Pendapatan Terhadap PDB



Selain itu, perlu dicatat bahwa dari tahun ke tahun, pajak penghasilan menyumbang hampir sebesar 50 persen dari total pajak yang diterima pemerintah. Hal tersebut mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Secara prinsip kebebasan ekonomi, hal ini menurunkan kebebasan masyarakat untuk mengonsumsi penghasilan yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Di sisi lain, tingginya pajak mencerminkan besarnya peran pemerintah dalam mengatur beroperasinya perekonomian nasional.

Sepanjang besaran rasio PPh tersebut tidak berubah, kebebasan ekonomi masyarakat tidak akan mengalami perbaikan.

II. Hukum dan Jaminan Hak Kepemilikan

Secara hukum, Indonesia masuk dalam kategori *civil law*, yang diadopsi dari sistem hukum pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan negara-negara *anglo-saxon* seperti Inggris-beserta persemakmurannya-, AS, Australila, Canada dan Selandia Baru menganut sistem *common law*.

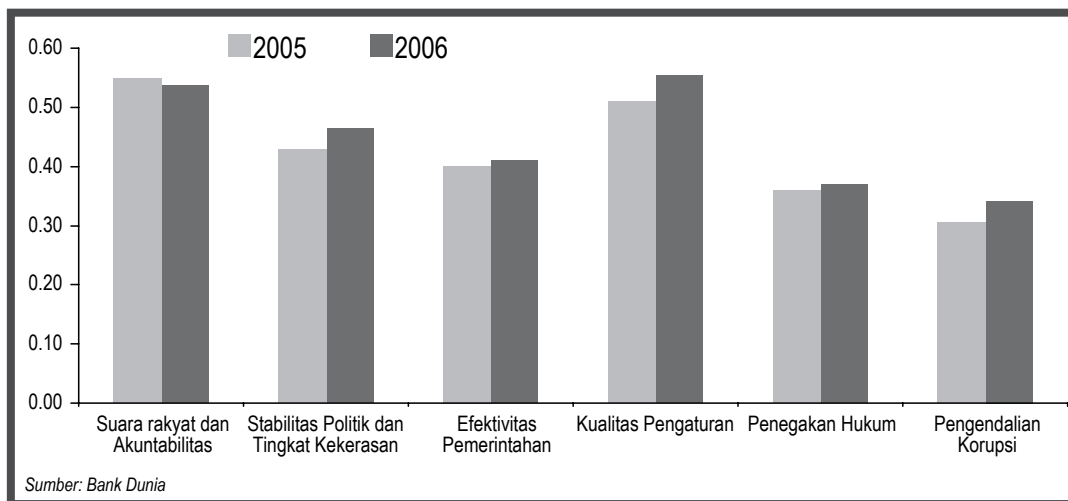
La Porta et al (1998) menemukan bahwa *civil law* memberikan perlindungan hukum yang lebih lemah atas kepentingan investor dan kreditor daripada sistem *common law*, yang memberikan perlindungan sangat kuat baik kepada pemegang saham maupun kreditor.⁷ Maka tidak heran, sektor keuangan di negara-negara penganut sistem *common law* cenderung berkembang lebih baik.

Sistem hukum yang kurang berpihak kepada dunia usaha, ditambah tingginya ketidakpastian hukum menyebabkan Indonesia semakin kehilangan daya tariknya sebagai tempat berbisnis. Parahnya lagi, aksi-aksi pelanggaran hukum juga justru dilakukan oleh para penegak hukum.

Laporan Organisasi angkutan daerah (Organda) menyebutkan bahwa beraneka pungli yang merebak di jalan-jalan raya di seluruh Indonesia dalam setahun nilainya mencapai Rp 18 triliun. Ironisnya, sebagian besar pungli dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari polisi, petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, hingga aparat pemerintah terhadap sopir-sopir yang melalui jalan tersebut.⁸

Grafik 5 memperlihatkan adanya perbaikan indeks pada hampir semua aspek. Ini merupakan perkembangan yang positif. Stabilitas politik yang terjaga, supremasi hukum, serta kontrol korupsi yang meningkat cukup kondusif bagi perkembangan ekonomi di tanah air.

Grafik 5. Indikator Tatakelola

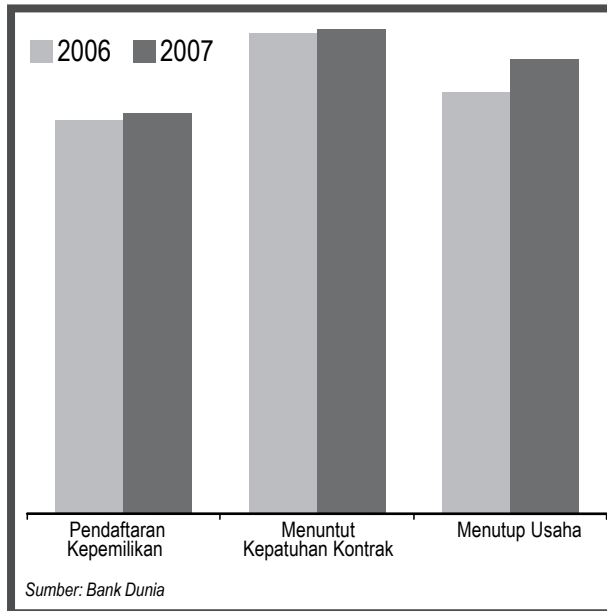


7 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny (1997). "Legal Determinants of External Finance," *Journal of Finance* 52, 1131-1150.

8 *Suara Pembaruan*, 23 Agustus 2006, "Pungli Jalanan Mencapai Rp 18 Triliun per Tahun".

Namun, perbaikan masih harus tetap dilakukan, terutama seputar masalah mafia peradilan yang masih marak. Selain itu, berbisnis pun juga lebih mudah, sebagaimana terlihat pada Grafik 6.

Grafik 6. Berbisnis di Indonesia: Beberapa Kemudahan



Kepatuhan terhadap kontrak, yang selama ini menjadi masalah yang cukup mengganjal mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan.

III. Uang

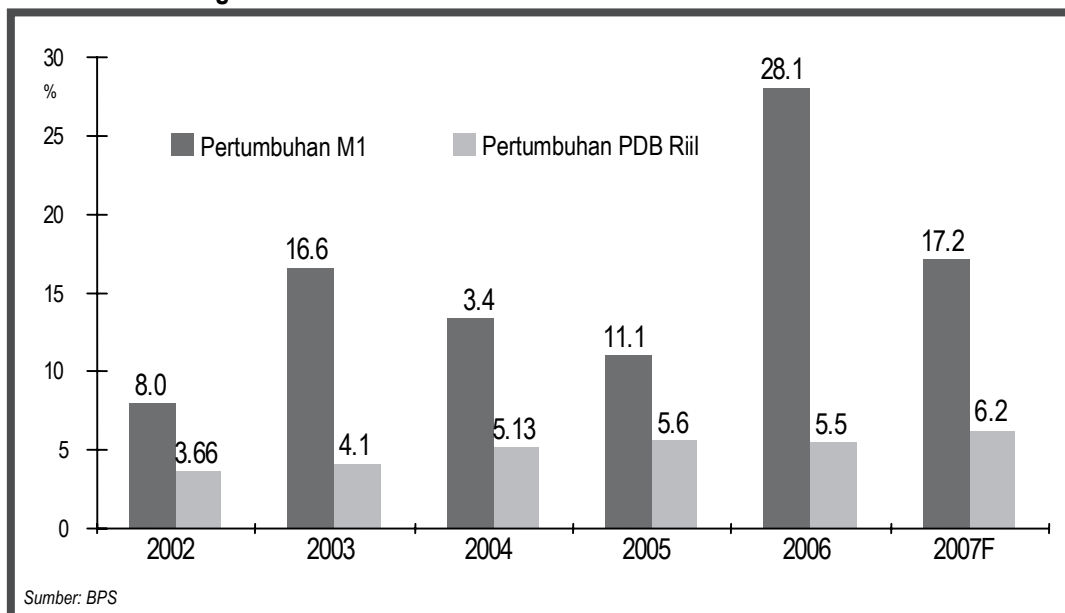
1. Pertumbuhan Uang

Grafik di bawah ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (*narrow money supply*, M1) ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB riil. Bahkan, sejak tahun 2003 hingga 2006 korelasi antara pertumbuhan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi terlihat seperti tidak konsisten secara teoritis.

Namun, hal tersebut bukan berarti telah terjadi anomali. Pertumbuhan uang beredar secara keseluruhan (M2) tetap merupakan faktor yang relevan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang dibiayai oleh uang kuasi (transaksi non-tunai).⁹

⁹ Menurut catatan BI, semakin lama masyarakat cenderung melakukan transaksi non-tunai. Ini terlihat dari pertumbuhan kartu kredit dan kartu debit yang masing-masing mencapai 15-30 persen dan 25-30 persen per tahun. Selain itu, statistik uang beredar mencatat rasio penggunaan uang giral dibandingkan dengan uang kartal bisa mencapai 52:48 persen. Diperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah.

Grafik 7. Pertumbuhan Uang Beredar



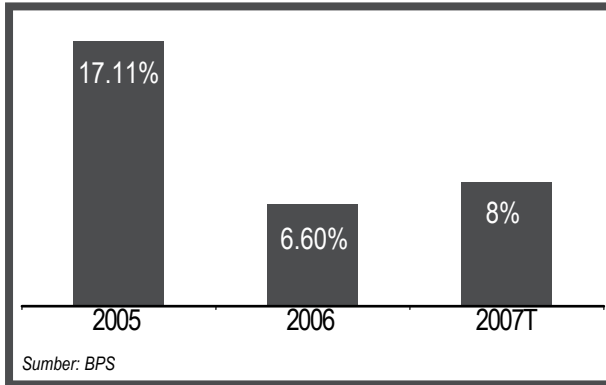
Grafik 7 memperlihatkan bahwa selisih pertumbuhan antara M1 dengan PDB riil mulai menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, pada tahun 2006, selisih tersebut justru melonjak. Jika dihitung, angkanya mencapai 22,6 persen.¹⁰

Namun, jika kami melihat dalam jangka yang lebih panjang, kesenjangan pertumbuhan antara M1 dengan PDB sebenarnya menunjukkan perkembangan yang tidak mengkhawatirkan. Kami meyakini bahwa selisih antara rata-rata pertumbuhan M1 dengan penjumlahan rata-rata pertumbuhan PDB dan laju inflasi hanyalah sebesar 1,5 persen.

2. Tingkat Inflasi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada tahun 2005 telah terjadi kenaikan harga BBM sebanyak dua kali. Kenaikan yang terakhir, yakni pada awal triwulan keempat, harga BBM mengalami kenaikan rata-rata sebesar 100 persen. Hal ini jelas membuat angka inflasi melonjak. Namun, tekanan inflasi kembali mereda pada tahun berikutnya menjadi 6,6 persen. Untuk tahun 2007 ini, pemerintah menargetkan angka inflasi di kisaran delapan persen.

¹⁰ Sebagaimana terlihat, selisih tersebut disebabkan oleh tingginya uang beredar. Salah satu penyebabnya ialah mulai membaiknya konsumsi rumah tangga di triwulan terakhir tahun 2006 akibat perbaikan daya beli dan penurunan inflasi. Peningkatan konsumsi tersebut terindikasi oleh adanya pertumbuhan konsumsi non-makanan, seperti pembelian motor, barang-barang elektronik, mobil dan barang tahan lama yang lain.

Grafik 8. Tingkat Inflasi Tahunan

Terlepas dari pencapaian target tersebut, naik turunnya angka inflasi dengan cukup tajam telah menimbulkan volatilitas. Hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa standar deviasi tingkat inflasi pada periode 2002-2006 mencapai 4,85. Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dari periode 2001-2005 yang mencapai 4,83.

Kalau target pemerintah tersebut tercapai, volatilitas inflasi periode 2003-2007 akan kembali merurun menjadi 4,83 persen. Dengan demikian, hal tersebut berdampak positif bagi iklim kebebasan ekonomi, karena volatilitas yang rendah mempermudah para agen ekonomi dalam mengambil keputusan bisnis.

IV. Perdagangan Internasional

Era perdagangan bebas memaksa Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk-produknya di pasar internasional. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara menjalin perjanjian kerjasama dengan negara lain.

Berikut ini adalah serangkaian perjanjian kerjasama yang dibentuk, baik individual maupun kolektif sebagai anggota ASEAN:¹¹

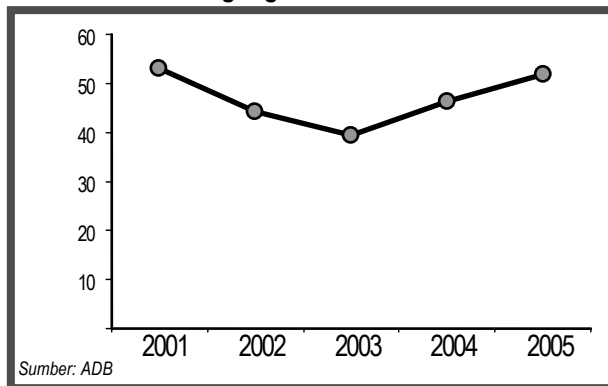
1. ASEAN Free Trade Area
2. ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement
3. ASEAN-China Free Trade Area
4. ASEAN-EU Free Trade Agreement
5. ASEAN-India Regional Trade and Investment Area.
6. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
7. ASEAN-Kore Free Trade Area
8. East Asia Free Trade Area
9. India-Indonesia Comprehensive Economic Cooperation Agreement
10. Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement

11 Asian Development Bank (2007). Diperoleh pada 14 November 2007 dari <http://www.adb.org>.

11. Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement
12. Pakistan-Indonesia Free Trade Agreement
13. Preferential Tariff Agreement-Group of Eight Developing Countries
14. US-Indonesia Free Trade Agreement

Berbagai perjanjian kerjasama tersebut memberikan kontribusi terhadap perdagangan internasional. Sebagaimana terlihat pada Grafik 9, menurut *Asian Development Bank* (ADB), keterbukaan perdagangan (*trade openness*) Indonesia mengalami perbaikan sejak tahun 2003.

Grafik 9. Keterbukaan Perdagangan Internasional



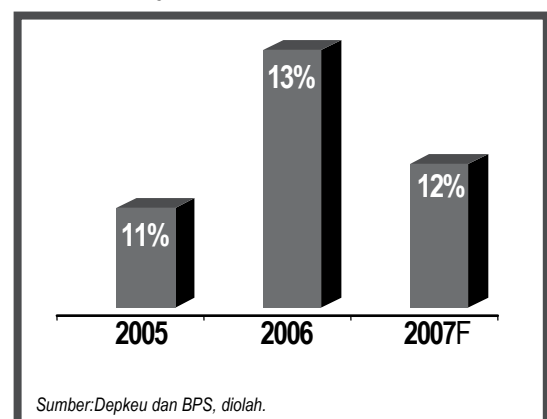
Namun demikian, meskipun indeks keterbukaan perdagangan menunjukkan perkembangan yang positif, para eksportir dan importir Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kendala-kendala tersebut seperti: buruknya infrastruktur, banyaknya pungutan liar, dan inefisiensi di pelabuhan.

Jika pemerintah mampu menghilangkan kendala-kendala tersebut, aktivitas perdagangan nasional hampir dapat dipastikan akan membaik.

1. Pajak Ekspor Impor

Sebagaimana terlihat pada grafik berikut, pajak yang diperoleh negara atas aktivitas perdagangan internasional mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan meningkatnya hambatan terhadap aktivitas perdagangan internasional.

Grafik 10. Pajak Ekspor Impor



Parahnya lagi, jika diamati, ternyata kenaikan pendapatan pemerintah dari aktivitas ekspor impor ternyata lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor impor itu sendiri. Nilai perdagangan internasional hanya bertumbuh sebesar 17,9 persen. Sedangkan pajaknya bertumbuh sebesar 37,4 persen.

Tanpa adanya kebijakan pengurangan pajak, aktivitas perdagangan akan semakin menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan potensinya. Gejala ini sudah mulai terlihat pada tahun 2007. Sejak awal tahun, pemerintah telah merevisi target ekspor, dari 20 persen hanya menjadi 14,5 persen untuk tahun 2007.

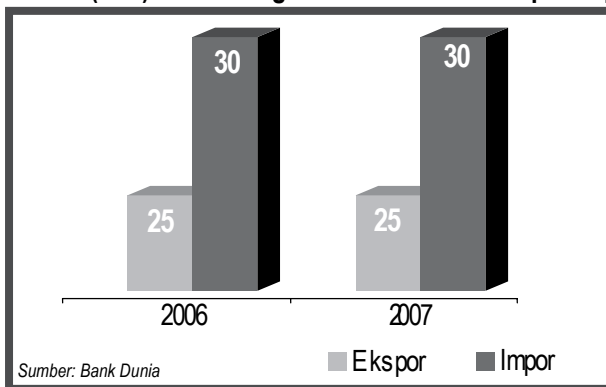
Dengan demikian, untuk memperbaiki kebebasan ekonomi, penurunan pajak diperlukan. Terlebih penurunan kinerja perdagangan internasional tidak hanya disebabkan oleh faktor domestik. Penurunan kinerja ekonomi mitra-mitra dagang utama seperti AS dan cenderung semakin banyaknya kebijakan teknis yang diterapkan oleh negara tujuan, menyebabkan semakin ketatnya kompetisi produk di pasar dunia.

Selain itu, pembebanan pajak dan tarif juga menimbulkan masalah lain. Terutama pada aktivitas importase, Departemen Keuangan melaporkan 6.200 importir, atau lebih dari 42 persen dari total 14.515 importir terdaftar, memiliki risiko tinggi melakukan penyelundupan. Hal ini jelas merugikan para importir legal, yang membayar bea untuk mengimpor barang, dimana mereka terpaksa harus menaikkan harga jual produknya. Dengan kata lain, telah terjadi persaingan yang tidak sehat di pasar domestik.¹²

2. Pengurusan Dokumen

Pajak bukanlah satu-satunya faktor penghambat aktivitas perdagangan lintas batas. Grafik di bawah ini memperlihatkan jumlah hari yang dibutuhkan dalam mengurus kelengkapan dokumen untuk menunjang aktivitas perdagangan tersebut.

Grafik 11. Waktu (hari) untuk Pengurusan Dokumen Ekspor Impor



¹² Penyelundupan itu sendiri tidak mudah untuk diberantas. Menurut Departemen Keuangan ada beberapa penyebab, yakni tingkat gaji dan remunerasi yang tidak sepadan dengan risiko, dan adanya kelemahan dalam sistem kepabeanan dan kepelabuhan.

Sebagaimana terlihat, tidak ada perbaikan yang terjadi pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merefleksikan belum efektifnya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengurusan dokumen perdagangan internasional.

Padahal, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen-dokumen berasosiasi dengan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjanjian bisnis. Dampaknya lagi-lagi ialah daya saing produk Indonesia yang tidak kunjung membaik.

Di sisi lain, melakukan reformasi birokrasi mempunyai tantangan tersendiri. Resistensi tentu akan timbul dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari panjangnya rantai birokrasi dalam pengurusan dokumen tersebut.

Melihat kurang adanya ketegasan dari pemerintah mengenai hal tersebut, kami dapat memperkirakan bahwa tidak akan ada perubahan yang signifikan pada tahun mendatang .

3. Pasar Gelap Valas

Tidak lama sejak krisis moneter melanda, Indonesia beralih dari rejim mengambang terkendali ke rejim mengambang bebas.¹³ Kelebihan dari sistem yang mengambang bebas ialah minimnya insentif bagi kehadiran pasar gelap (*black market*) untuk bertransaksi valuta asing (valas).¹⁴ Ini terjadi karena kurs yang terjadi sudah sesuai dengan mekanisme pasar yang ada, sehingga hampir tidak mungkin memperoleh premi yang besar.¹⁵

4. Pengendalian Arus Modal Asing

Selama sekitar 40 tahun lamanya, aktifitas penanaman modal-baik domestik maupun asing diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada 29 Maret 2007 lalu, UU penanaman modal yang baru disahkan oleh DPR.

Lahirnya UU baru tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi iklim investasi di tanah air. UU yang lama sudah dianggap tidak relevan, dan kurang mengakomodir perbaikan daya saing Indonesia di mata investor asing. Ini terindikasi dari rendahnya aliran modal asing ke tanah air. Selama kurun waktu 1998 sampai 2004, angka rata-rata persetujuan investasi asing (PMA) anjlok hingga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,45 persen

13 Rejim mengambang bebas tidak berarti tanpa batas. Dalam kenyataannya, BI selalu menjaga nilai tukar rupiah atas dolar AS dalam kisaran yang dianggap nyaman, baik oleh para eksportir maupun importir. Saat ini, kisaran tersebut ialah sebesar Rp 8.500,- hingga Rp 9.500,- per dolar.

14 Bahkan sejak Indonesia masih menganut rejim *semi-fixed exchange rate* sekalipun, yakni sebelum 1997, premi pasar gelap di Indonesia termasuk yang terendah (Jayaratnam, Ashwini (2003), "How Does The Black Market Exchange Premium Affect Foreign Direct Investment (FDI)?", Department of Economics, Stanford University).

15 Namun, pasar gelap valas tetap ada meskipun ukurannya sangat kecil. Pelakunya bersifat perorangan dan berkumpul di suatu wilayah di Jakarta Pusat. Selisih harga tawaran merek dengan yang resmi hanya berkisar 50-100 poin. Kelebihannya, mereka bersedia menerima uang kertas dolar dalam keadaan yang kucal.

Lahirnya UU baru tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya Daftar Negatif Investasi (DNI) pada 3 Juli 2007, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 77 Tahun 2007. Perpres ini mengatur bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi investasi asing. Dengan demikian, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 118 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 96 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi.

Kriteria penyusunan bidang usaha yang tertutup dalam DNI baru didasarkan pada aspek kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral budaya, serta kepentingan nasional lainnya.

Sedangkan untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan disusun dengan pertimbangan perlindungan kepada UKM, pengawasan produksi dan distribusi, serta peningkatan kapasitas teknologi.

DNI baru tersebut mengatur sekitar 300 bidang usaha dan pembatasannya tidak berlaku bagi bisnis yang sudah dijalankan. Lebih banyaknya bidang usaha yang diatur tidak berarti bahwa bidang usaha yang dibatasi semakin bertambah. Artinya, banyaknya bidang usaha yang diatur hanya mencerminkan bahwa DNI baru tersebut lebih detail.

Penyusunan DNI yang lebih detail tersebut berdampak positif. Semakin detail pengaturan bidang usaha, akan semakin sempit pula “wilayah abu-abu” yang mungkin ditimbulkannya. Dampaknya, kesalahan intepretasi akan semakin minimal dan lebih transparan bagi pemodal.

Namun demikian, masih ada hal yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memberikan keterangan tambahan atas Perpres tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kemungkinan timbul pertanyaan kritis seputar penetapan DNI tersebut.

Misalnya, mengapa usaha perfilman masuk dalam daftar DNI? Padahal kepemilikan asing pada industri tersebut justru diharapkan dapat meningkatkan kualitas perfilman nasional. Demikian pula dengan kepemilikan asing pada sektor telekomunikasi *fixed line*, yang maksimal hanya boleh mencapai 49 persen.

Sebagai salah satu sektor yang berperan dalam perbaikan infrastruktur, industri telekomunikasi masih memerlukan perbaikan kinerja melalui peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat dan riset-pengembangan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemain asing diperlukan untuk membuat pasar menjadi semakin semarak.

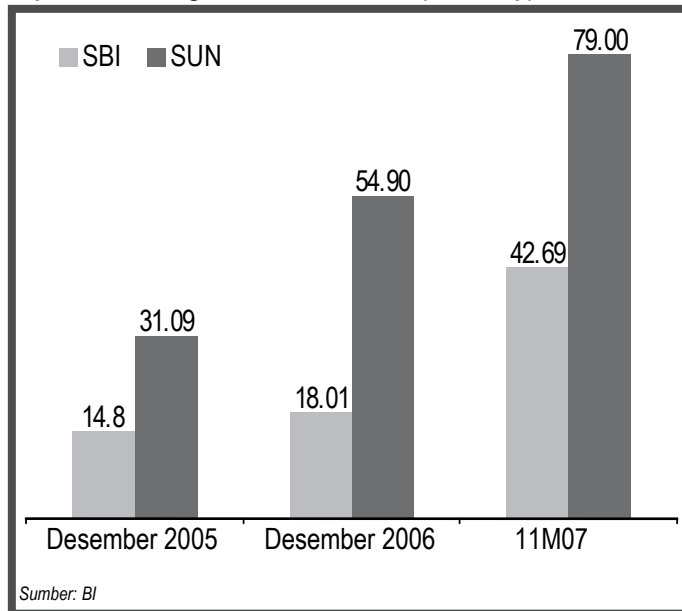
Kesimpulannya, penerbitan DNI tentu membatasi kebebasan ekonomi, terlebih jika dasar pengambilan keputusannya tidak diketahui oleh publik secara luas.

Namun, hal sebaliknya terjadi pada kepemilikan asing di berbagai instrumen aset keuangan. Berulang kali pihak BI meyakinkan bahwa tidak akan ada pembatasan terhadap kepemilikan

asing. Demikian pula pemerintah, yang tidak melakukan pembatasan pembelian SUN.¹⁶ Tidak dibatasinya pihak asing dalam instrumen keuangan tentu berdampak positif bagi kebebasan ekonomi.

Grafik 12 memperlihatkan kepemilikan asing dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) yang terus mengalami peningkatan.

Grafik 12. Kepemilikan Asing, Investasi Portofolio (Triliun Rp)



Tingginya minat investor asing untuk menanamkan dananya pada aset-aset keuangan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Hal ini juga dirasakan oleh negara-negara berkembang lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal ini, yakni:

- (1) Tingginya likuiditas global yang disebabkan rendahnya suku bunga global selama periode 1998-2004.
- (2) Membaiknya kondisi ekonomi negara-negara berkembang, dan mendorong masyarakatnya menuju masyarakat berinvestasi.
- (3) Belum adanya pengawasan dan regulasi yang ketat dari otoritas bursa terhadap aktivitas yang dilakukan para investor asing di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- (4) Masuknya modal asing ke dalam negeri dari negara yang kaya modal (*capital abundant*) ke negara yang miskin modal (*capital scarce*) secara teoritis akan menurunkan suku bunga, yang berdampak positif bagi dunia bisnis.

¹⁶ Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membatasi pihak asing hanya diberlakukan pada pasar obligasi ritel.

V. Regulasi Kredit, Tenaga Kerja dan Bisnis

Menurut hasil survey *World Economic Forum*, pada tahun 2006 Indonesia mengalami perbaikan peringkat daya saing global (*global competitiveness*). Pada tahun 2005 Indonesia hanya menempati peringkat 69 dari 107 negara. Sedangkan pada tahun 2006, Indonesia berhasil menempati peringkat 50 dari 125 negara.

Beberapa pembenahan yang dilakukan pemerintah telah mendatangkan hasil. Namun, masih ada yang perlu dilakukan pemerintah-dalam hal ini pemerintah pusat-terutama terkait otonomi daerah. Pakar Otonomi Daerah, Prof. Dr.Ryaas Rasyid mengatakan bahwa pada tahun 2006 terdapat 20.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Padahal pada tahun 2003, jumlah Perda bermasalah baru berjumlah 7.000 aturan.

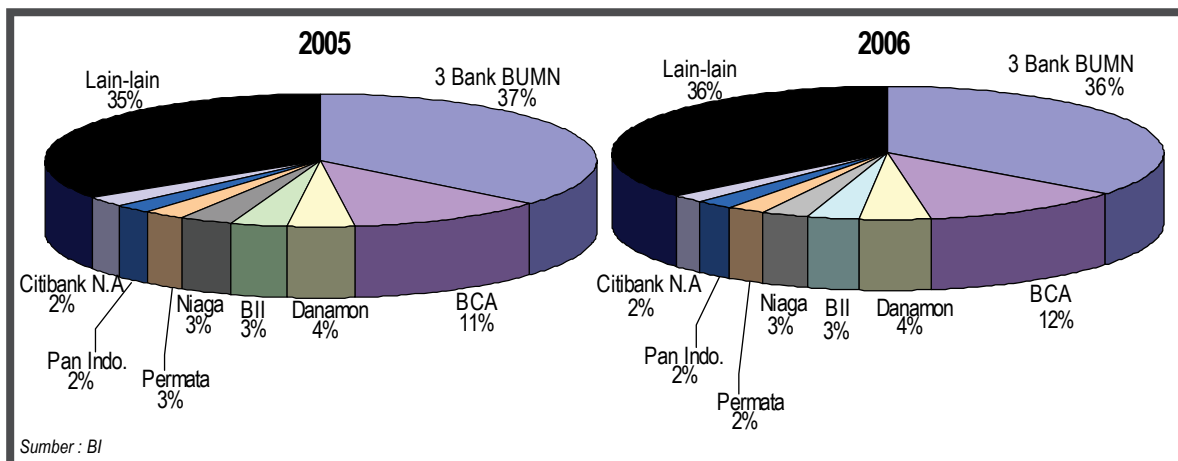
Banyaknya pungutan yang dilakukan pemerintah tersebut mencerminkan tidak adanya apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap inisiatif berinvestasi. Pemda yang seharusnya menciptakan terobosan untuk mempermudah investasi justru memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha di wilayahnya.

1. Pasar Kredit

Indonesia merupakan perekonomian berbasis perbankan (*bank-based economy*). Artinya, di antara semua bentuk lembaga keuangan, perbankan memainkan peran yang paling penting.

Grafik di bawah ini memperlihatkan penguasaan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank-bank umum di tanah air. Sebagaimana terlihat, tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) menguasai 37 dari total DPK yang dihimpun sektor perbankan. Hal ini terjadi baik pada tahun 2005 maupun 2006.

Grafik 13. Dana Pihak Ketiga



Besarnya penguasaan DPK oleh bank-bank BUMN merupakan hal yang sangat wajar. Bank-bank persero sangat mendominasi aset perbankan nasional.

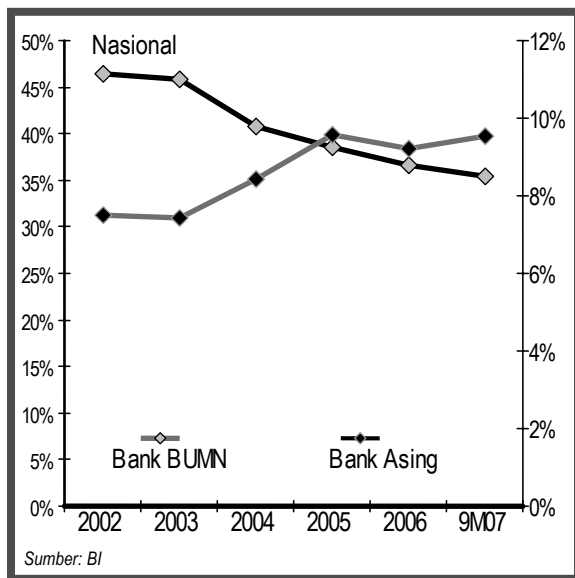
Namun, sebagaimana terlihat pada grafik berikut, penguasaan bank persero terhadap aset perbankan nasional mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dari 46 persen pada tahun 2002, menjadi tinggal 36 persen pada tahun 2006.

Sedangkan di lain pihak, bank asing menunjukkan gejala yang berlawanan. Meskipun perlahan, penguasaan aset bank perbankan nasional oleh bank asing menunjukkan kecenderungan positif.

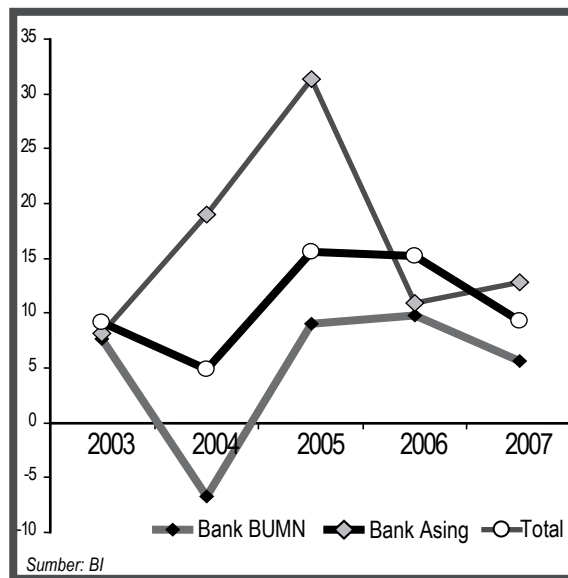
Pertumbuhan aset merupakan salah satu faktornya. Secara nasional, aset perbankan terus mengalami pertumbuhan,¹⁷ namun bank persero tidak, bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2004.

Hal yang sebaliknya terjadi pada bank asing. Asetnya bertumbuh, bahkan hingga mencapai 31 persen pada tahun 2005.

Grafik 14.
Persentase Terhadap Aset Perbankan Nasional

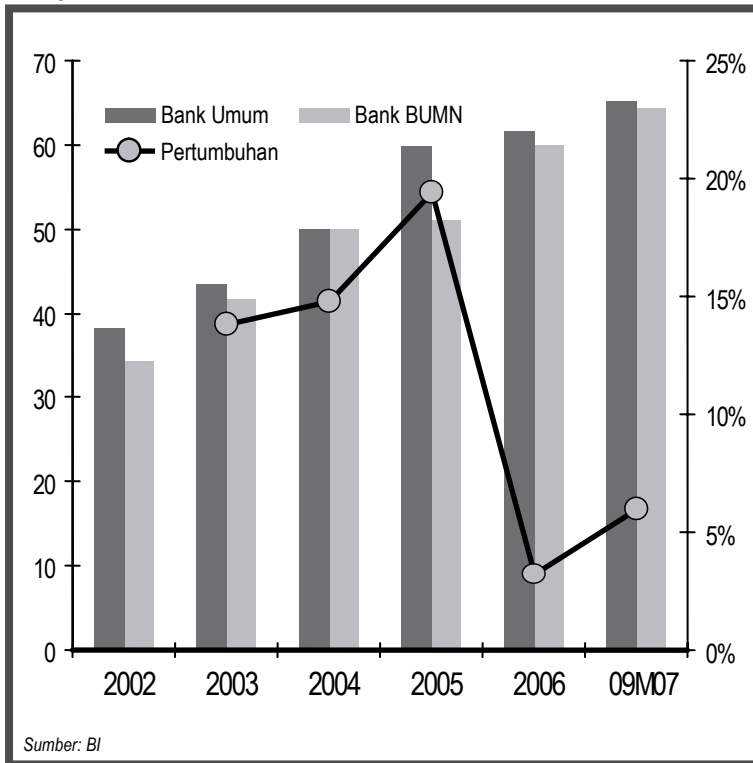


Grafik 15.
Pertumbuhan Aset



Tumbuhnya aset perbankan nasional tidak terlepas dari tumbuhnya penyaluran kredit. Pada tahun 2006, rasio kredit yang tersalur dibandingkan dengan DPK telah mencapai 61,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kredit tetap ekspansif, meskipun pertumbuhannya melambat akibat lesunya sektor riil setelah kenaikan BBM di akhir tahun 2005.

¹⁷ Kecuali pada tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,3 persen.

Grafik 16. Penyaluran Kredit (%)

Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus berlangsung sampai tahun 2007. Ini dimungkinkan karena pada awal tahun tersebut, BI telah mengeluarkan delapan kebijakan baru. Salah satunya adalah pelonggaran aturan mengenai kualitas aktiva produktif dan batas maksimum pemberian kredit. Kredit yang bertumbuh memberikan dampak positif bagi kebebasan ekonomi masyarakat.

2. Pasar Tenaga Kerja

Ketika baru terpilih, salah satu target pemerintahan SBY-JK ialah menurunkan tingkat pengangguran dalam lima tahun hingga hampir setengah kalinya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menargetkan tiap satu persen pertumbuhan ekonomi seharusnya menyerap sekitar 427.000 hingga 600.000 tenaga kerja, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,6 persen per tahun.

Banyak kalangan menilai target tersebut terlalu optimistis, karena dalam beberapa tahun terakhir elastisitas penyerapan tenaga kerja menjadi mengecil. Setiap satu persen pertumbuhan kini hanya mampu menyerap 200.000-250.000 tenaga kerja saja. Akibatnya, terjadilah pembengkakan sektor informal yang bertumbuh lebih cepat ketimbang sektor formal.

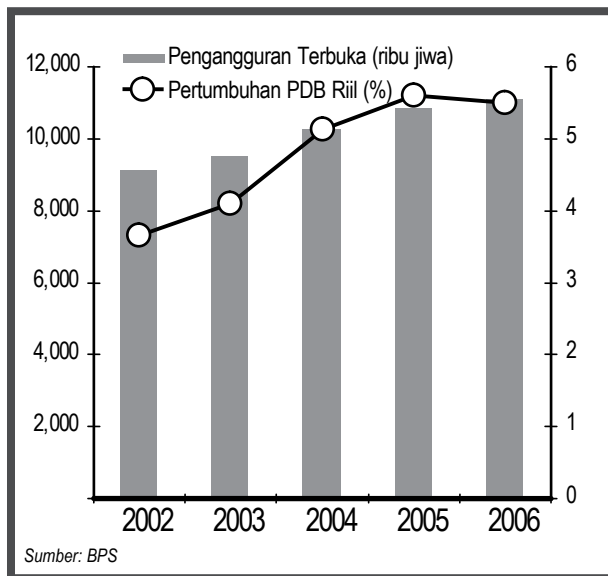
Grafik 17 menggambarkan jumlah pengangguran terbuka yang terus-menerus bertambah, meskipun PDB bertumbuh. Inilah yang para ekonom sebut sebagai "pertumbuhan tanpa lapangan pekerjaan" (*"jobless growth"*). Salah satu penyebab yang mungkin menjadi faktor adalah masih rendahnya kapasitas produksi terpakai di sektor manufaktur, yang baru mencapai sekitar 70 persen, masih di bawah level pra-krisis sebesar 90 persen.

Faktor lain yang juga dapat menjadi penyebab ialah iklim ketenagakerjaan di tanah air itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor yang dianggap menghambat:

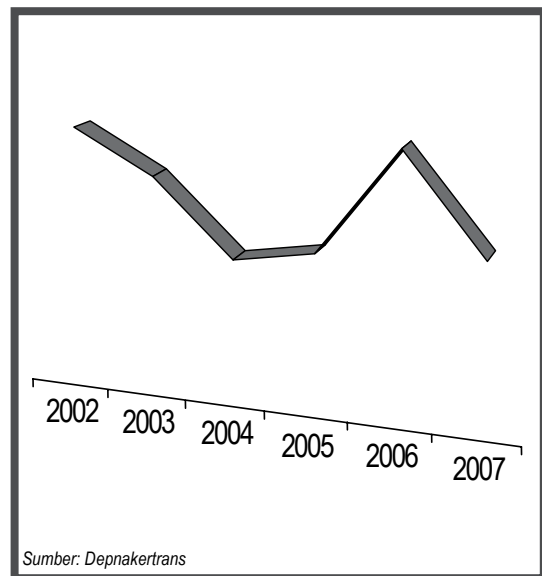
(1) Penetapan upah minimum regional (UMR)

Grafik di bawah ini memperlihatkan peningkatan UMR pada tahun 2006 yang lebih tinggi dari tahun 2005. Ini mungkin disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk menyesuaikan pendapatan masyarakat yang secara riil menurun pasca kenaikan BBM.

Grafik 17. Pertumbuhan Jumlah Pengangguran dan PDB Riil



Grafik 18. Pertumbuhan Upah Minimum



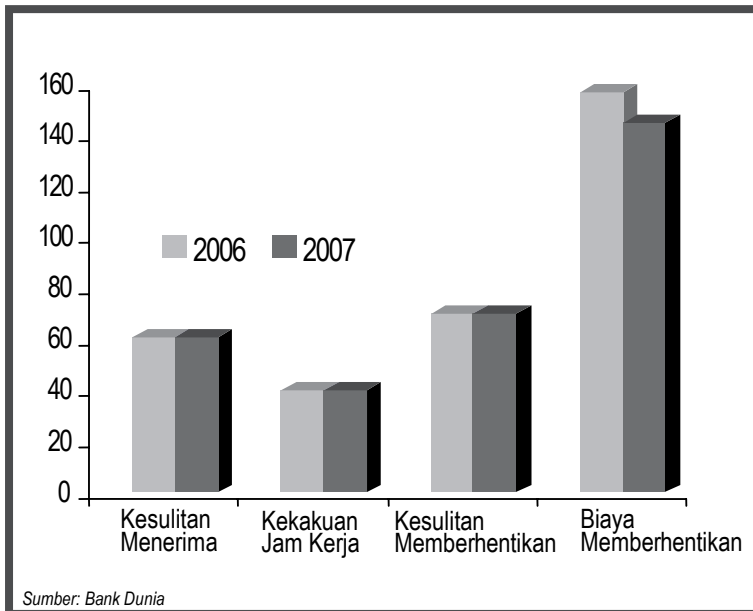
Namun, kenaikan upah minimum juga membawa dampak negatif. Hasil penelitian SMERU Research Institute (2001) menunjukkan bahwa secara total, perkiraan elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum adalah $-0,112$ dan nyata secara statistik.

Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 10 persen kenaikan tingkat upah minimum riil, terdapat lebih dari satu persen pengurangan penyerapan tenaga kerja. Dampak yang lebih parah dirasakan oleh kaum perempuan dan usia muda, dimana penyerapan tenaga kerjanya menjadi turun sebesar 3 persen.

(2) Fleksibilitas Pasar

Grafik berikut memperlihatkan kondisi kekakuan pasar tenaga kerja yang merupakan hasil survei Bank Dunia. Sebagaimana terlihat, hampir semua aspek yang dinilai tidak mengalami peningkatan pada tahun 2006 dibanding tahun sebelum. Perbaikan hanya terjadi pada besarnya biaya untuk memberhentikan pekerja.

Grafik 19. Kekakuan Pasar Tenaga Kerja (Indeks)



Hal ini mencerminkan masih diperlukannya perubahan lebih intensif. Jika tidak, angka pengangguran akan semakin bertambah mengingat setiap tahun terdapat penambahan usia kerja. Sulitnya menerima dan memberhentikan pekerja hanya menciptakan disinsentif bagi sektor usaha untuk memperluas kesempatan kerja di sektor formal.

Konsekuensinya, akan semakin banyak angkatan kerja yang berkontribusi bagi perkembangan “ekonomi bawah tanah” (*“underground economy”*). Hal ini berdampak negatif bagi proses peningkatan produktivitas nasional.

Dengan demikian, pihak yang diuntungkan hanyalah mereka yang sudah memperoleh pekerjaan tetap di sektor formal. Sedangkan para angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan atau mereka yang diberhentikan dari pekerjaan menjadi pihak yang sangat dirugikan dari iklim tenaga kerja yang tidak fleksibel seperti saat ini.

Friedman mengingatkan bahwa penetapan upah minimum dan pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel akan menyulitkan para pekerja sukarela yang bersedia bekerja tanpa menerima upah. Dengan demikian, penetapan upah minimum, terlebih jika kecenderungannya terus menaik, akan berdampak buruk bagi kebebasan ekonomi.

3. Regulasi Bisnis

World Investment Report (2005) melaporkan bahwa 64.000 perusahaan transnasional mampu menciptakan 53 juta lapangan pekerjaan secara langsung. Maka tidak heran, banyak negara di dunia yang berusaha menarik investasi asing ke negara mereka.

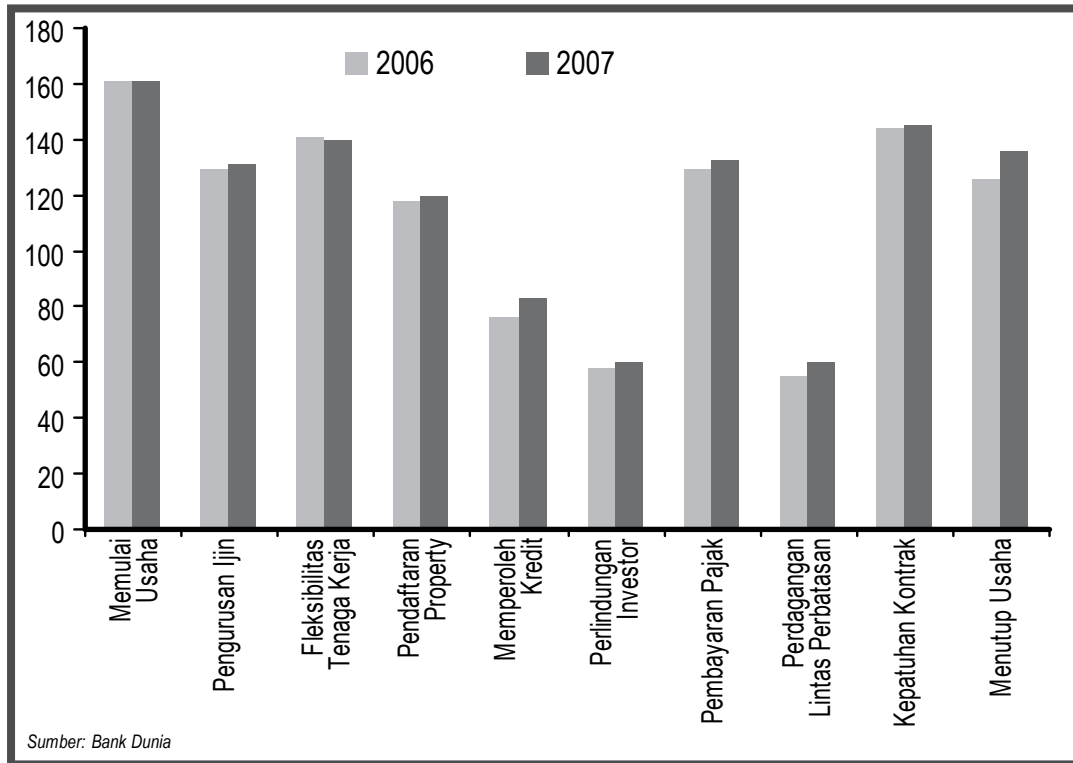
Namun, data statistik yang terdapat dalam laporan yang sama memberitakan bahwa Indonesia merupakan negara penerima aliran dana terkecil, dibandingkan negara-negara pesaingnya, seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia pada tahun 2004.

Kenyataan ini menunjukkan adanya kemerosotan daya saing Indonesia di mata investor asing. Selama kurun waktu 1998 sampai 2004 selama kurun waktu 1998 sampai 2004, angka rata-rata persetujuan investasi anjlok hingga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -8,25 persen (PMDN) dan -0,45 persen untuk PMA. Padahal, dimasa Orde Baru, angka rata-rata tersebut sangat tinggi.

Bahkan, memburuknya sentimen berinvestasi terjadi pada usaha-usaha yang justru secara teoritis seharusnya memperoleh keuntungan dari memburuknya nilai tukar. Perusahaan berorientasi ekspor, misalnya. Melemahnya nilai tukar seharusnya meningkatkan profitabilitasnya, sehingga hal ini mendorong mereka untuk menambah kuantitas investasinya. Namun, studi yang dilakukan oleh Prasetyantoko dan Thalo (2006) menunjukkan bahwa kecenderungan tersebut tidak terjadi. Ini terjadi karena disebabkan oleh strategi manajemen keuangan yang buruk, serta iklim investasi yang juga tidak memadai.

Hal tersebut memicu pemerintah untuk segera melakukan pembenahan agar daya saing Indonesia membaik. Namun, apa yang telah dilakukan ternyata masih belum cukup. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, pada tahun 2006 Indonesia hanya menduduki peringkat ke-135. Artinya, terjadi penurunan peringkat, karena pada tahun sebelumnya Indonesia berada di urutan 131.

Padahal, sejumlah perbaikan yang telah dilakukan telah memberikan hasil, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 20. Kemudahan Berbisnis

Grafik memperlihatkan bahwa peningkatan terjadi pada hampir semua aspek kemudahan berbisnis yang dinilai. Namun anehnya, peringkat Indonesia justru memburuk. Ini terjadi karena iklim usaha di negara-negara lain yang semakin membaik dan pembenahan yang dilakukan lebih berhasil.

Dengan demikian, untuk memperoleh peringkat yang lebih baik, Indonesia harus melakukan perubahan yang lebih mendasar lagi. Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Namun, banyak pihak –termasuk dunia usaha sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan aturan tersebut– pesimis bahwa pemerintah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut.

Jika dilihat, sebenarnya paket kebijakan tersebut menawarkan insentif yang merangsang dunia usaha. Namun, sikap skeptis selalu muncul ketika mengingat bahwa kelemahan Pemerintah RI selalu terletak pada langkah implementasinya. Hal ini terbukti. Salah satu contoh, selama berbulan-bulan, kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai komoditas primer belum direalisasikan.

KESIMPULAN

Dari tinjauan yang telah dilakukan, kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Peran pemerintah dalam perekonomian nasional menunjukkan gejala penurunan. Ini terlihat dari konsumsi, subsidi, pajak penghasilan, dan rasio aset BUMN yang mengecil pada tahun 2007.
- (2) Secara umum, aspek hukum dan politik juga mengalami perbaikan. Penegakan hukum, stabilitas politik dan pengendalian korupsi yang membaik berdampak positif terhadap jaminan kepemilikan individu.
- (3) Selisih uang beredar dengan PDB riil dan inflasi tetap terjaga dalam tingkat yang cukup kondusif. Tingkat inflasi juga mengalami perbaikan. Jika target inflasi yang ditetapkan pemerintah tercapai, volatilitas inflasi akan mereda dibanding periode sebelumnya.
- (4) Kinerja perdagangan internasional semakin membaik. Hal ini didukung oleh semakin rendahnya pajak ekspor dan impor, meskipun belum ada perbaikan kinerja dalam hal lamanya pengurusan dokumen. Daftar Negatif Investasi (DNI) juga sebenarnya memperlihatkan adanya keberpihakan pemerintah dalam investasi, namun pemerintah tentu perlu memberikan keterangan tentang dasar pemikiran dibalik penetapan DNI tersebut.
- (5) Deposito, aset, dan penyaluran kredit masih didominasi oleh bank-bank BUMN. Angka penyaluran kredit secara keseluruhan pun terus mengalami peningkatan. Namun, kontribusi aset bank-bank BUMN tersebut terhadap total aset perbankan nasional mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena pertumbuhan asetnya yang lamban. Hal ini berdampak positif bagi iklim kebebasan ekonomi.
- (6) Namun pasar tenaga kerja masih menghadapi masalah. Penetapan upah minimum dan pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel berdampak negatif bagi iklim kebebasan ekonomi, bahkan berpotensi memperburuk angka pengangguran. Bagi perusahaan berskala besar, kebijakan upah minimum akan disiasati dengan mendorong penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Namun bagi usaha kecil dan menengah, kebijakan penetapan upah minimum akan mendorong terjadinya pengurangan karyawan. Selanjutnya, hal tersebut akan membuat UKM menjadi tidak berkembang, tetap kecil, karena hanya mampu menghasilkan output yang kecil.
- (7) Regulasi bisnis secara umum mengalami peningkatan. Namun, hal tersebut masih belum cukup, mengingat negara lain memperlihatkan peningkatan yang lebih signifikan. Sehingga tidak heran, peringkat iklim bisnis Indonesia bukan membaik, malah justru memburuk. Hal ini berdampak negatif bagi perkembangan iklim kebebasan ekonomi.

REFERENSI

- Asian Development Bank. 2007. Diperoleh pada 14 November 2007 dari <http://www.adb.org>.
- Gwartney, James and Lawson. 2007. *Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report*. Economic Freedom Network.
- Gwartney, James dan Lawson. 2004. "Ten Consequences of Economic Freedom" dalam NCPA Policy Report No. 268.
- Jayaratnam, Ashwini. 2003. "How Does The Black Market Exchange Premium Affect Foreign Direct Investment (FDI)?" Department of Economics, Stanford University.
- Kaufmann, Daniel, Kraay, Mastruzzi. 2007. "Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006". Bank Dunia.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny. 1997. "Legal Determinants of External Finance". *Journal of Finance* 52. Halaman 1131-1150.
- Madan, Anisha. 2002. "The Relationship between Economic Freedom and Socio-Economic Development". Diperoleh dari <http://www.econ.ilstu.edu/uauje>.
- Prasetyantoko, Agustinus and Thalo. 2007. "Why do Investment Recover Slowly in Indonesia?". Makalah dipresentasikan pada "The 2nd Indonesian Business Management Conference (IBMC) 2007". Diselenggarakan oleh Prasetya Mulya Business School pada 30 Januari 2007.
- SMERU Research Institute. 2001. *Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia*.
- Suara Pembaruan*. 23 Agustus 2006. "Pungli Jalanan Mencapai Rp 18 Triliun per Tahun".
- The Economic Freedom of the World Project. 2007. Diperoleh dari <http://www.freetheworld.com/> pada 23 Oktober 2007.
- Tures, J. 2003. "Economic Freedom and Conflict Reduction: Evidence from The 1970s, 1980s, and 1990s." *Cato Journal*. Vol. 22. No. 3.

TENTANG PENULIS

Nawa Poerwana Thalo

Peneliti Ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Nawa telah menjadi peneliti bidang ekonomi dan bisnis di TII sejak Januari 2005. Dengan pengalaman sekitar tujuh tahun, kajiannya meliputi bidang ekonomi makro-moneter, lembaga keuangan, serta desentralisasi fiskal.

Berbagai lembaga donor utama dan perusahaan pernah mensponsori kajian-kajian yang dilakukan oleh Nawa. Beberapa tulisannya mengenai topik-topik tersebut juga pernah dimuat dalam surat kabar harian.

Nawa juga berpengalaman dalam jasa konsultasi bisnis. Beberapa kali ia dipercaya untuk menjadi peneliti utama dalam penugasan analisis bisnis dan valuasi perusahaan, atas perusahaan-perusahaan Multinasional maupun Badan Usaha Milik negara. (*)

TENTANG LEMBAGA



THE INDONESIAN INSTITUTE (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif TII. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Kontak & Informasi:

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Jakarta 10250, Indonesia
Tel. 021 3905558 Fax. 021 31907814 | www.theindonesianinstitute.com

FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT (FNS) adalah sebuah organisasi non-pemerintah nirlaba dan independen yang berkomitmen untuk mempromosikan kebijakan dan politik yang liberal.

Berasal dari Jerman, FNS memiliki reputasi tinggi berkaitan dengan promosi Kebebasan dalam harga diri manusia sebagai persyaratan utama dari sebuah masyarakat dimana orang dapat hidup dengan bebas dan damai. Untuk menciptakan masyarakat terbuka sedemikian kami dibimbing oleh prinsip-prinsip Liberalisme dan pesan toleransi dan penerimaannya atas keragaman. Seiring dengan kegiatan-kegiatan dan insitusi-institusinya di Jerman, FNS memiliki sejumlah kantor di Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia.

Pendidikan masyarakat adalah salah satu kegiatan utama FNS, yang terdiri dari seminar, konferensi dan publikasi yang ditujukan untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip liberal. FNS dibimbing oleh konsep-konsep inti liberalisme seperti hak asasi manusia, penegakan hukum, demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas.

Untuk informasi lebih lanjut tentang FNS, silakan kunjungi:

www.fnst.org
www.fnfasia.org



ECONOMIC FREEDOM NETWORK ASIA

ECONOMIC FREEDOM NETWORK ASIA (EFN Asia)

Berdasarkan inisiatif Pemenang Nobel Milton Friedman dan Gary Becker, Fraser Institute di Vancouver, Kanada membuat serangkaian indikator untuk mengukur tingkat kebebasan yang dijamin oleh sistem hukum dan ekonomi dan penerapan kebijakan ekonomi, keuangan, pajak dan mata uang dalam perekonomian nasional. Berdasarkan indikator-indikator yang ada, dibuatlah Indeks Kebebasan Ekonomi, yang setiap tahun diterbitkan dalam *Economic Freedom of the World Annual Report* sejak tahun 1996, yang menyediakan perbandingan antara urutan semua Negara berdasarkan tingkat kebebasan ekonomi mereka. Lebih dari 70 lembaga penelitian ekonomi dan *think tanks* liberal bergabung dengan inisiatif dari Fraser Institute, termasuk Liberal Institute of Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNS) di Berlin yang menerbitkan *Economic Freedom Report* setiap tahun di Jerman.

Berdasarkan hasil temuan dalam laporan yang diterbitkan oleh Fraser Institute di Vancouver, FNS telah mendukung dan terus mendorong pembentukan "*Economic Freedom Network Asia*" (EFN Asia) untuk memungkinkan suatu diskusi yang lebih luas tentang kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sebuah syarat untuk penanggulangan kemiskinan. EFN Asia terdiri dari *think tanks* dan lembaga-lembaga penelitian dari lebih 20 negara-negara Asia, yang bekerja sama untuk mendorong pembuatan Indeks Kebebasan Ekonomi di Asia; menganalisa pembangunan ekonomi, kekuatan dan kelemahan Negara-negara Asia dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Sejak tahun 1998, konferensi-konferensi tahunan, yang diselenggarakan oleh FNS, memberikan kesempatan untuk menilai dan membahas metode-metode dan indikator-indikator Indeks Kebebasan Ekonomi dari sudut pandang Asia dan untuk meningkatkan kerja sama strategis di antara para anggota jaringan.

EFN Asia dan anggota-anggotanya berjuang untuk memperluas kebebasan individu dalam ranah ekonomi yang akan membantu pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai tujuan-tujuannya, Jaringan ini memberikan wadah untuk dialog politik, pendidikan publik dan pertukaran akademik untuk memperluas perdebatan kebijakan publik ke kelebihan-kelebihan pasar bebas dan pemerintahan yang terbatas. Jaringan ini mencakup organisasi-organisasi, individu-individu seperti penasihat kebijakan, jurnalis, perwakilan korporasi, pembuat kebijakan, dan pejabat pemerintahan. EFN Asia juga bermitra dengan organisasi-organisasi di luar Asia.

Untuk informasi lebih jauh tentang EFN Asia, silakan kunjungi:

www.fnfasia.org/efn



Jl. Wahid Hasyim No. 194 Jakarta 10250, Indonesia
Tel. 021 3905558 Fax. 021 31907814
www.theindonesianinstitute.com